

Analisis Pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) terhadap Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Abidatul Kamillah¹, Shinta Dewi Rismawati², Alvita Tyas Dwi³

^{1,2,3}UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: abidatulkamila22@gmail.com¹, sinthadw@yahoo.com², alvitaaryani@gmail.com³

ABSTRAK: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak penghasilan pasal 21 (pph 21) dan pajak bumi bangunan (PBB) terhadap realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data time series pertahun yaitu 2016-2020 dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Hasilnya menunjukkan bahwa dalam uji f yaitu pada nilai sig untuk pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) (X1) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Jawa Tengah (Y) adalah $0,580 > 0,05$ dan f hitung $0,724 < f$ tabel $19,2$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_3 ditolak yang berarti variabel Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) (X1) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) (X2) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Jawa Tengah (Y).

Kata kunci: Pph21, PBB, Pendapatan Jawa Tengah

ABSTRACT: The purpose of this study was to determine the effect of article 21 income tax (pph21) and land building tax (PBB) on the realization of Central Java Province income. The analytical method used is the classical assumption test and hypothesis testing. The data used is time series data per year, namely 2016-2020 from the official website of the Central Statistics Agency (BPS). The results show that in the f test, the sig value for the effect of Article 21 Income Tax (Pph 21) (X1) and Land Building Tax (PBB) (X2) simultaneously on Central Java Income (Y) is $0.580 > 0.05$ and f count $0.724 < f$ table 19.2 so it can be concluded that H_3 is rejected, which means that the variables of Article 21 Income Tax (Pph 21) (X1) and Land Building Tax (PBB) (X2) simultaneously have no effect on Central Java Income (Y).

Keywords: Pph21, PBB, Pendapatan Jawa Tengah

1. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia, DJP, pajak adalah pembayaran wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang dikenai paksaan secara hukum tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kepentingan negara. kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pajak memberikan sebagian besar pendapatan negara di Indonesia, namun bukan berarti harus dipungut sebanyak-banyaknya. Ini bertentangan dengan hak warga negara untuk terus menjalani kehidupan. Namun, diharapkan penerimaan pajak dapat dipungut seefisien mungkin. Hal ini karena, walaupun memasukkan uang secara efisien bukan berarti memasukkan dana secara maksimal atau sebanyak-banyaknya, namun berarti baik subjek pajak maupun objek pajak harus berusaha untuk memasukkan dana (Amina Lainutu, 2013).

Salah satu penerimaan pajak yang termasuk dalam fungsi anggaran, atau pajak sebagai sarana yang digunakan pemerintah untuk mengumpulkan uang untuk membayar tagihannya, adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan dipotong dari pegawai/pejabat sektor publik dan swasta yang tunduk pada ketentuan yang digariskan oleh undang-undang terkait. Pajak atas penghasilan (keuntungan) yang diperoleh atau diperoleh orang atau badan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang subjek pajak, objek pajak, dan cara menghitung dan menyelesaikan kewajiban pajak. Undang-Undang Pajak Penghasilan juga memberikan lebih banyak kemudahan dan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. PPh Pasal 21 merupakan salah satu dari sekian banyak komponen yang membentuk PPh itu sendiri. Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, komisi, bonus, gratifikasi, pensiun, atau imbalan dalam bentuk lain (Angelia Friska M. 2013).

Di Indonesia, pajak dapat dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah tergantung pada organisasi yang memungutnya. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah federal. Pajak daerah, di sisi lain, adalah pungutan yang tidak dikendalikan atau ditangani oleh pemerintah federal melainkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menjadi dasar hukum (Rima Adelina, 2013).

Secara umum, pajak bumi dan bangunan serta PPh pasal 21 (pPh 21) berkontribusi terhadap pendapatan Provinsi Jawa Tengah dalam merealisasikan pendapatan. Target pendapatan daerah yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sebesar Rp28,301 triliun, meningkat 8,99 persen dari target tahun 2019. Untuk mencapai target tersebut, semua pihak harus memaksimalkan berbagai potensi yang sudah ada guna meningkatkan tingkat pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (www.jatengprov.go.id).

Berikut ini data Pajak penghasilan pasal 21 (Pph 21), pajak bumi bangunan (PBB) dan realisasi pendapatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2020:

Tahun	Pph21 (Juta Rupiah)	PBB (Ribu Rupiah)	Pendapatan Jawa Tengah (Ribu Rupiah)
2017	4 749 664.68	109 167 137 818	80 510 004 351
2018	5 053 657.63	156 516 131 552	82 460 035 621
2019	5 613 719.34	216 427 824 278	76 605 675 602
2020	6 102 898.08	125 967 883 578	86 728 086 011
2021	5 671 510.46	195 705 933 361	84 708 281 428

Sumber: www.bps.go.id

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder diperoleh dari situs internet. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id. Dan menggunakan data time series bersifat makro yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) selama tahun 2016-2020 meliputi data pajak penghasilan pasal 21 (pPh 21), pajak bumi bangunan (PBB) dan

pendapatan Provinsi Jawa Tengah periode tahunan. Variabel Dependent (Y) merupakan variabel terikat yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independent. Variabel dependent dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Jawa Tengah (Y). Variabel Independent (X) atau variabel bebas merupakan variabel yang tidak dipengaruhi atau tidak tergantung pada variabel lain, melainkan variabel ini mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel Independennya yaitu Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 (Pph 21) (X1) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) (X2). Metode yang digunakan dalam analisis data kuantitatif penelitian ini yaitu menggunakan program bantuan komputer yaitu SPSS dan uji yang dilakukan adalah Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Normalitas

Normalitas, yaitu untuk mendeteksi data penelitian yang didapat apakah berdistribusi normal atau tidak. Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dipakai untuk mendapati normalitas. Apabila hasil nilai signifikansi uji lebih dari α , maka data dikatakan berdistribusi normal dan begitu sebaliknya.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PPH21	PBB	Pendapatan_Jateng
N		5	5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	6,7340	11,1920	10,9160
	Std. Deviation	,04393	,12558	,02302
Most Extreme Differences	Absolute	,242	,182	,197
	Positive	,181	,168	,149
	Negative	-,242	-,182	-,197
Test Statistic		,242	,182	,197
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan tabel diatas bahwa nilai sig. pada Pph21 (x1) adalah $0,200 > 0,05$, pada PBB mempunyai nilai sig. $0,200 > 0,05$ dan pendapatan Jateng nilai sig.nya $0,200 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa data diatas berdistribusi normal.

1. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada kolerasi antara variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dalam model regresi yang digunakan. Motode yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yaitu dengan menggunakan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10, maka model regresi dapat dikatakan bebas dari masalah multikolinearitas.

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	95,0% Confidence		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	10,450	1,972		5,300	,034	1,967	18,934					
PPH21	,255	,298	,487	,857	,482	-1,027	1,537	,292	,518	,461	,898	1,114
PPB	-,112	,104	-,611	-1,074	,395	-,560	,336	-,455	-,605	-,579	,898	1,114

a. Dependent Variable: Pendapatan_Jateng

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai tolerance lebih dari 0,1 yaitu 0,898 dan nilai VIF kurang dari 10 yaitu 1,114. Artinya dalam data diatas tidak terdapat masalah multikolinearitas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari faktor pengganggu pada data pengamatan yang satu dengan data pengamatan yang lain. Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan didalam model regresi. Data dikatakan bebas heterokedastisitas jika nilai signifikan absolut residual dan variabel independen > α (0,05).

Correlations

			PPH21	PBB	Unstandardized Residual
Spearman's rho	PPH21	Correlation Coefficient	1,000	,359	,103
		Sig. (2-tailed)	.	,553	,870
		N	5	5	5
	PBB	Correlation Coefficient	,359	1,000	,000
		Sig. (2-tailed)	,553	.	1,000
		N	5	5	5
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,103	,000	1,000
		Sig. (2-tailed)	,870	1,000	.
		N	5	5	5

Dari tabel diatas diketahui Nilai sig (2-tailed) PPH 21 (X1) $0,870 > 0,05$, Nilai sig (2-tailed) PBB (X2) $1,000 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan data diatas tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas.

3. Uji Regresi Linear Berganda

Regresi Linear Berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	10,450	1,972		5,300	,034
	PPH21	,255	,298	,487	,857	,482
	PBB	-,112	,104	-,611	-1,074	,395

a. Dependent Variable: Pendapatan_Jateng

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa:

Nilai sig untuk pengaruh Pph 21 terhadap Pendapatan Jateng sebesar $0,482 > 0,05$ dan nilai thitung $0,857 < t_{tabel} 4,303$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti Pph 21 (X1) secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Jateng (Y).

Nilai sig untuk pengaruh PBB terhadap Pendapatan Jateng sebesar $0,395 > 0,05$ dan nilai thitung $-1,074 < t_{tabel} 4,303$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti PBB (X2) secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Jateng (Y).

a. Uji f

Uji f bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

- ✓ Jika nilai sig $< 0,05$ atau f hitung $> f_{tabel}$, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.
- ✓ Jika nilai sig $> 0,05$ atau f hitung $< f_{tabel}$, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y.

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,001	2	,000	,724	,580 ^b
	Residual	,001	2	,001		
	Total	,002	4			

a. Dependent Variable: Pendapatan_Jateng

b. Predictors: (Constant), PBB, PPH21

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Nilai sig untuk pengaruh Pph 21 (X1) dan PBB (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Jateng (Y) sebesar $0,580 > 0,05$ dan f hitung $0,724 < f_{tabel} 19,2$ sehingga dapat disimpulkan bahwa

H3 ditolak yang berarti secara simultan Pph 21 (X1) dan PBB (X2) tidak terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Jateng (Y).

4. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik dan uji hipotesis, dan hasil menunjukkan bahwa dalam uji t Nilai sig untuk pengaruh Pph 21 terhadap Pendapatan Jateng sebesar $0,482 > 0,05$ dan nilai thitung $0,857 < t_{tabel} 4,303$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak yang berarti Pph 21 (X1) secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Jateng (Y). Nilai sig untuk pengaruh PBB terhadap Pendapatan Jateng sebesar $0,395 > 0,05$ dan nilai thitung $-1,074 < t_{tabel} 4,303$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti PBB (X2) secara parsial tidak terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Jateng (Y). Dan uji f menunjukkan Nilai sig untuk pengaruh Pph 21 (X1) dan PBB (X2) secara simultan terhadap Pendapatan Jateng (Y) sebesar $0,580 > 0,05$ dan f hitung $0,724 < f_{tabel} 19,2$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak yang berarti secara simultan Pph 21 (X1) dan PBB (X2) tidak terdapat pengaruh terhadap Pendapatan Jateng (Y).

5. DAFTAR PUSTAKA

- Amina Lainutu. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak PPh 21 Terhadap Penerimaan PPh 21 pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1 (3).
- Angelia Friska M. 2013. *Analisis perhitungan, pembayaran dan pelaporan pph pasal 21 pada dinas pendidikan kecamatan tuminting*. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 1 (4).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia DJP. 2013. *Lebih Dekat dengan Pajak*, Jakarta.
- Rima Adelina. 2013. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik*. Jurnal Akuntansi Unesa 1 (2), 1-19.
- Badan Pusat Statistik www.bps.go.id
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah www.jatengprov.go.id